

Presiden beberapa waktu lalu. Konflik itu muncul karena adanya perbedaan pandangan politik di antara pimpinan PPP. Pada Pilpres lalu, PPP secara resmi mendukung pencalonan Prabowo-Hatta. Namun di satu pihak ada keinginan juga dari internal PPP untuk bergabung ke kubu Jokowi. Saat itu, situasi internal PPP semakin panas karena terjadi juga klaim kepemimpinan antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan kubu Emron Pangkapi.

Perbedaan pandangan politik, ditambah juga saling klaim kepemimpinan akhirnya secara tidak langsung menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh internal PPP. Oleh karenanya konflik yang menimpa internal PPP ini dirasa bisa diselesaikan dengan dilaksanakannya Muktamar. Namun persoalan sejak awal adalah karena adanya dualisme kepemimpinan, maka sekalipun Muktamar ini dilaksanakan tetap saja memicu perpecahan di tubuh Partai PPP.

Terhitung sejak 09 Oktober 2014, Suryadharma Ali resmi diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP. Dimana sebagai balasan pemberhentian dirinya, Suryadharma Ali pun memecat balik jajaran kepengurusan harian DPP PPP. Yang dipecat oleh Suryadharma antara lain, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy. Saat seperti itulah Suryadharma Ali kemudian membentuk susunan kepengurusan baru. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Emron Pangkapi. Akibatnya, dualisme kepemimpinan dan saling klaim di antara masing-masing jajaran pengurus DPP PPP pun semakin tidak bisa dihindari.

Dualisme kepemimpinan ini semakin terlihat dari Muktamar yang dijadikan sebagai solusi atas konflik yang ada justru dilakukan sebanyak dua kali.

Kubu Suryadharma Ali melaksanakan Muktamar ke VIII pada 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 dan bertempat di Jakarta. Adapun hasil Muktamar Jakarta tersebut menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum partai PPP. Dalam hasil rapat paripurna, Djan Faridz ditetapkan sebagai calon ketua umum tunggal mengesampingkan Ahmad Yani, yang sebelumnya juga dicalonkan sebagai ketua umum.

Sedangkan kubu Emron Pangkapi memilih untuk menyelenggarakan Muktamar ke VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014. Hasil Muktamar tersebut adalah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy resmi menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019. Adapun Romahurmuziy menjadi calon tunggal ketua umum dalam Muktamar Surabaya dan dipilih secara aklamasi oleh kader PPP¹.

Partai Persatuan Pembangunan ini termasuk dalam kategori Partai Politik Islam selain dikarenakan lambang partainya yang berupa Ka'bah tetapi juga karena ideologi partainya yang selalu dipegang teguh dalam AD-ART nya yaitu partai politik Islam berazaskan Islam. Meskipun demikian PPP bukanlah partai yang berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, PPP selalu masuk dalam pemerintahan. Hal ini terbukti dari perolehan suara PPP tingkat provinsi. Sekalipun dalam skala nasional, dari tahun 2004 misalnya, PPP memang tidak pernah menduduki bangku 5 (lima) besar partai politik di Indonesia.

¹Ryan Situmeang, "Romy Ketua PPP Muktamar Surabaya", [http://www.tempo.co/read/news/2014/10/16/078614776/Romy-Resmi-Jadi-Ketua-Umum-PPP-Muktamar-Surabaya/\(Minggu 08 Maret 2015, 15:26\)](http://www.tempo.co/read/news/2014/10/16/078614776/Romy-Resmi-Jadi-Ketua-Umum-PPP-Muktamar-Surabaya/(Minggu%2008%20Maret%202015,%2015:26))

Dalam penelitian ini, konflik yang dimaksud adalah perbedaan pandangan politik antara elit PPP sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam internal PPP.

2. **Elit:** orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron). Keller menambahkan pemerintahan oleh elit merupakan syarat yang harus dipenuhi bila masyarakat ingin tetap terintegrasi. Menurut Keller, untuk masyarakat yang kompleks dan heterogen, ada kecenderungan memiliki elit yang beragam pula atau lebih populer dengan istilah Elit Strategis. Di setiap bidang kehidupan penting (ekonomi, politik dan sosial) akan muncul orang/sekelompok orang yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang lain. Elit dirumuskan sebagai posisi puncak dalam struktur-struktur sosial terpenting di masyarakat. Elit strategis ini tidak hanya dipegang oleh merka yang termasuk dari bagian struktur-struktur sosial penting, tetapi berlaku juga bagi siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan

pusat mengakibatkan terjadinya rembetan konflik sampai ke tingkat wilayah dengan adanya pembekuan Kepengurusan DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Partai politik sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya. Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang dinyatakan lolos verifikasi KPU secara struktur menginginkan adanya perbaikan dari segi struktur kepengurusan guna mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik di Internal Partai Nasdem.

Berdasarkan masalah dan kesimpulan diatas maka perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasannya. Dalam skripsi ini hanya dipaparkan mengenai akibat dari konflik perbedaan pandangan dari internal partai Nasdem sehingga memunculkan faksi-faksi di tingkat DPW. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan selain akan membahas tentang dampak dari konflik internal di tubuh partai akan diteliti (dalam hal ini adalah PPP) juga akan membahas tentang masa depan dari partai PPP pasca konflik elit yang terjadi di tingkat pusat itu.

2. Bambang, *Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang (Studi tentang Sumber dan Dampak pada Pemilu 2009)*, 2010. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Penelitian ini membahas tentang partai politik di Indonesia belum terinstitusionalisasi dengan baik. Kita semua tentu berharap kelak institusionalisasi partai-partai politik di Indonesia akan kian membaik seiring dengan semakin dewasa umur demokrasi kita. Untuk itu mutlak dibutuhkan upaya perbaikan kehidupan kepartaian melalui jalur institusi dengan menempatkan kelompok masyarakat sipil sebagai motor penggerak utama. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat mendesakkan sejumlah agenda perbaikan institusional terhadap partai-partai politik melalui perangkat-perangkat regulasi yang dapat merangsang perbaikan internal di dalam tubuh partai-partai politik tersebut. Dengan institusionalisasi partai politik yang semakin baik diharapkan kehidupan politik di Indonesia pun akan menjadi lebih stabil sehingga kesejahteraan rakyat sebagai tujuan demokrasi menjadi tercapai secara maksimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas skripsi tersebut hanya memaparkan mengenai sumber dan dampak dari konflik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan juga akan membahas tentang bagaimana elit politik (yakni DPW PPP Jawa Timur) memandang konflik yang sedang terjadi di internal partainya.

